

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashafa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- , 2011, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Bastian, Indra, 2006, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Bryant, Coralie, dan Louise G. White (Terj. Rusyanto), 1987, *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta.
- Gultom, RMS, 1981, *Memahami GBHN*, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Hadi, Sutrisno, 2001, *Metodologi Riset Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- , 2013, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1997, *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Kunarjo, 1993, *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, UI Press, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Murti, Bhisma, Laksono Trisnantoro, Ari Probandari, Atik Heru Maryanti, Deni Hardianto, Mubasyir Hasanbasri, Titik Wisnuputri, 2006, *Perencanaan dan Penganggaran untuk Investasi Kesehatan di Tingkat Kabupaten dan Kota*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Naning, Ramdlon, 1983, *Gatra Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

- Ndraha, Taliziduhu, 1990, *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Grasindo, Jakarta.
- Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soejito, Irawan, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- , dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sujanto, 1991, *Cakrawala Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum* (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 1998, *Manajemen Pemerintahan*, Pertja, Jakarta.
- Tim Pengkajian BPHN, 2011, *Pengkajian Konstitusi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Tim Penyusun Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, 2016, *Status RTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia: Status Tanggal 29 Maret 2016*, Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta
- Tutik, Titik Triwulan, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.

B. Antologi

- Muhjad, Hadin, "Otonomi dan Pembangunan Nasional", dalam Abdurrahman, 1987, *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta.

C. Artikel Jurnal

Anggraini, Yessi, Armen Yasir, dan Zulkarnain Ridlwan, “Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Fiat Justicia*, Volume 9, Nomor 1, Tahun 2015.

Pamungkas, Dwi Ratna, Sarwono, Ainul Hayat, “Perencanaan Pembangunan Ruang Publik Untuk Kebutuhan Anak (Studi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume 2, Nomor 4, 2014.

D. Tugas Akhir

Salehan, Nasrul Suhuf, 2015, *Urgensi Kedudukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Berkaitan dengan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Jember, Fakultas Hukum, Jember.

Syaifullah, 2008, *Analisis Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di Kota Magelang (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan Tahun 2007)*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Magister Ilmu Administrasi, Semarang.

E. Makalah

Rahmatunnisa, Mudiwati, “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)”, *Makalah*, Seminar Nasional Sistem Ketatanegaraan Indonesia “Reformulasi Model GBHN: Tinjauan terhadap Peran dan Fungsi MPR RI dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”, MPR dan Universitas Padjajaran, Bandung, 25 April 2013.

F. Artikel Internet

Berita Kemendagri, “Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Susun Perda RPJMD”,
<http://www.kemendagri.go.id/news/2016/03/17/mendagri-ingatkan-kepala-daerah-susun-perda-rpjmd>, diakses pada 8 September 2016

Hukum Online, “Surat Edaran Bukan Peraturan Perundang-Undangan”,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18765/surat-edaran-bukan-peraturan-perundangundangan>, diakses pada 8 September 2016.

Ihsanuddin, “Ketua MPR: Hampir Semua Fraksi Sepakat Pentingnya Haluan Negara”,
http://nasional.kompas.com/read/2016/03/30/12104181/Ketua.MPR.Hampir.Semua.Fraksi.Sepakat.Pentingnya.Haluan.Negara?utm_campaign=related&utm_medium=bp-kompas&utm_source=news&, diakses 15 April 2016.

Isra, Saldi, “Wacana Menghidupkan GBHN”,
<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/12/15320071/Wacana.Menghidupkan.GBHN?page=all>, diakses 20 April 2016.

Kesowo, Bambang, “GBHN dan Amandemen UUD”,
<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/19/16000091/GBHN.dan.Amandemen.UUD?page=all>, diakses 15 April 2015.

Nugraha, Ogie, “Sekilas Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah”,
<http://bappeda.pandeglangkab.go.id/sekilas-tentang-perencanaan-pembangunan-daerah/>, diakses 1 Juli 2016.

Saputra, Endang, “Mahfud Nilai Tak Penting Hidupkan Kembali Istilah GBHN”,
<http://www.satuharapan.com/read-detail/read/mahfud-nilai-tak-penting-hidupkan-kembali-istilah-gbhn>, diakses 27 Mei 2016.

Tashandra, Nabilla, “Ketua MPR Sambut Positif Usul PDI-P Kembalikan GBHN”,
<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/12/12203371/Ketua.MPR.Sambut.Positif.Usul.PDI->

P.Kembalikan.GBHN?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd, diakses 15 April 2016

G. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112).

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112).

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10).